

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRAC</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1 Pengadaan Barang/Jasa .....	6
1. Definisi pengadaan barang dan jasa .....	6
2. Tujuan pengadaan barang dan jasa .....	6
3. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa .....	7
4. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa .....	7
5. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa .....	8
2.2 Akuntansi Perpajakan .....	12
1. Peranan Akuntansi Pajak .....	13
2. Prinsip Akuntansi Pajak .....	14
3. Fungsi Akuntansi Pajak.....	15
4. Pajak Penghasilan (PPH) .....	15
5. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	16
6. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	20
2.3 Perlakuan Akuntansi Pajak.....	24
1. Pajak Penghasilan.....	24
2. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	25
3. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	26
4. Pajak Pertambahan Nilai.....	27
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu proses untuk mengadakan barang/jasa tertentu pada suatu proyek untuk mendukung kemaksimalan kinerja suatu instansi tertentu. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang seperti pengadaan mobil dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan pengadaan tanah pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti jasa teknik.

Kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/'institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

Kontrak pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksana swakelola.

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Terutang (SPT).